



Kebijakan Politik *United Malay National Organization (UMNO)* dalam Perkembangan Islam di Malaysia 1981-2003 M

Nurul Hasanah

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
nurulaksara96@gmail.com*

Abstract

United Malay National Organization (UMNO) is a political organization that serves as a forum for Malaysian people to express their main aspirations in an effort to fight British colonialism in Malay lands. The policy of the Malayan Union by the British government actually ignited the spirit of the Malay community to oppose the policy through UMNO. Malaysia as a multi-ethnic, racial and religious country indirectly demands the government to be fair in making policies so as not to cause friction even though it is dominated by the Muslim community. This problem is studied using a political approach to government with Carl Friedrich's policy theory. The research method used is the historical method which includes 4 stages; heuristics, verification, interpretation, and historiography. This study found that UMNO's political policy to be pro-Islamic encouraged the development of Islam which was marked by the establishment of Islamic research institutes, Islamic Teacher Schools, International Islamic University (IIUM), Islamic Banks, Islamic Insurance and Islamic Pawnshops. Thus, Islam becomes the foundation for Malaysian society in everyday life because the values of Islamic teachings are embedded in every individual.

Keywords: *Political Policy, Islamic Development, UMNO, Malaysia.*

Abstrak

United Malay National Organization (selanjutnya UMNO) merupakan

organisasi politik yang menjadi wadah masyarakat Malaysia untuk menyampaikan aspirasi utamanya dalam upaya melawan penjajahan Inggris di tanah Melayu. Kebijakan Uni Malaya oleh pemerintah Inggris justru menyulut semangat Masyarakat Melayu untuk menentang kebijakan tersebut melalui UMNO. Malaysia sebagai negara multi etnis, ras, dan agama secara tidak langsung menuntut pemerintah untuk bersikap adil dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan gesekan meski didominasi oleh masyarakat Muslim. Masalah tersebut dikaji menggunakan pendekatan politik pemerintahan dengan teori kebijakan milik Carl Friedrich. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yg mencakup 4 tahap; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini memperoleh temuan bahwasanya kebijakan politik UMNO untuk bersikap pro Islam mendorong terjadinya perkembangan Islam yang ditandai dengan didirikannya lembaga penelitian Islam, Pembangunan Sekolah Guru Islam, Universitas Islam Internasional (IIUM), Bank Islam, Asuransi Islam dan Pegadaian Islam. Dengan demikian, Islam menjadi landasan bagi masyarakat Malaysia dalam kehidupan sehari-hari karena nilai-nilai ajaran Islam tertanam dalam setiap individu.

Kata Kunci: *Kebijakan Politik, Perkembangan Islam, UMNO, Malaysia.*

PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan pesat dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Seiring dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai tersebut, Malaysia menjadi negara yang semakin diperhitungkan posisinya dalam kancah politik internasional di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan berakhirnya penjajahan Inggris atas Malaysia pada 31 Agustus 1957.

Dalam aspek politik, Melayu merupakan salah satu etnis yang tidak dapat dipisahkan dari peta perpolitikan Malaysia. Etnis Melayu memiliki jumlah penduduk 22,606,197 juta jiwa atau 68,88% dari jumlah keseluruhan penduduk Malaysia. Etnis Melayu yang notabene muslim secara tidak langsung memberikan peluang besar bagi perolehan suara dalam pemilu, meskipun Malaysia bukan negara muslim. Bagi etnis Melayu, Islam bukan hanya agama dan keyakinan yang dianut oleh pemeluknya tetapi Islam juga menjadi landasan identitas mereka. Selain etnis Melayu terdapat etnis lain seperti etnis Cina dan India yang juga memeluk Islam. Karena itulah, nuansa Islam begitu kental mewarnai kehidupan terutama dalam aspek perpolitikan di Malaysia.

Sejak menjadi negara merdeka pada 31 Agustus 1957, posisi Islam semakin diperhitungkan dalam sistem politik dan mendapat tempat khusus dalam Konstitusi Malaysia karena "Islam adalah agama federasi". Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam, secara kebiasaan berbahasa Melayu, dan mengikuti adat resam Melayu. Selain itu, Islam juga dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan konflik politik di Malaysia. Hal ini berakar kuat dari adanya peran pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan sehingga menjadi komitmen bagi masyarakat dalam menjalankannya.

Walaupun demikian, pemerintah tetap harus mempertimbangkan keberadaan warga non-Muslim dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu kebijakan utamanya politik, pemerintah harus mampu bertindak adil agar tidak terjadi gesekan atau konflik dalam masyarakat yang diakibatkan ketidakpuasan dari warga non-Muslim. Tokoh politik Malaysia dituntut untuk mengaktualisasikan gerakan politik Islam dengan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat non-Muslim. Kebijakan politik pemerintah ini dipengaruhi atau didominasi oleh partai politik.

Salah satu partai politik yang cukup kuat di Malaysia yaitu UMNO, *United Malay National Organization*. Sebagai partai politik multi etnis, UMNO selalu melindungi dan memajukan kepentingan politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi Melayu. Tujuan awal UMNO sebagai partai politik adalah untuk menyatukan dan menyalurkan nasionalisme Malaysia, memperoleh kemerdekaan dari Inggris, mempertahankan dominasi politik dan membuat kompromi yang diperlukan dalam koalisi multi etnis.

UMNO lahir di Johor pada 11 Mei 1946, dengan Dato' Onn Jaafar sebagai pemimpin pertamanya. Pada masa-masa awal berdirinya, Dato' Onn Jaafar memiliki inisiatif untuk menyatukan orang-orang Melayu Johor dalam gerakan Melayu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jawaban atas tantangan dan seruan untuk bersatu dengan semua serikat Melayu di tanah Melayu. Orang Melayu Johor terus memberikan dukungan kuat kepada UMNO, bahkan di bawah kepemimpinan Tuanku Abdul Rahman. Dukungan kuat yang diberikan orang Melayu kepada UMNO menunjukkan keyakinan kuat masyarakat bahwa UMNO benar-benar merupakan pihak yang membela bangsa Melayu dan Islam.

Kebangkitan Islam global yang melanda seluruh Malaysia terjadi bersamaan dengan adanya tipe kepemimpinan baru di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada tahun 1981. Sejak pertengahan tahun 1981, ketika Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri sekaligus pimpinan UMNO berupaya mempertahankan kebangkitan tersebut dengan program islamisasi dan secara serentak mempertahankan kepemimpinan langsung dan kontrol atas urusan-urusan keislaman, yang dapat dilihat dari sejumlah tindakan yang ditempuhnya. Pada tahun 1982 UMNO mengkooptasi Anwar Ibrahim, pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang merupakan organisasi fundamentalis politis yang terpenting di Malaysia.

Pada periode tersebut banyak kebijakan politik yang menguntungkan umat Islam. Kebijakan tersebut dapat dilihat dengan berdirinya sejumlah institusi baru, seperti Bank Islam Malaysia, yang disusul oleh perusahaan asuransi Islam dan pegadaian Islam, Universitas Islam Internasional, Yayasan Pembangunan Islam Malaysia, dan Akademi Pelatihan Guru Islam. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan status hakim agama dan pengadilan syariat hingga setara dengan pengadilan sipil.

Jika UMNO melakukan islamisasi lebih lanjut, maka hal ini akan melahirkan persoalan-persoalan sebagai Negara yang plural baik dari aspek etnis maupun agama. Sebagai pemimpin UMNO, Mahathir Muhammad menyeru anggota partai agar tidak mempersoalkan isu keanggotaan warga negara non-muslim di tubuh UMNO, karena konstitusi UMNO sendiri membenarkan penyertaan mereka. Usaha untuk mewujudkan dasar toleransi tersebut dimanifestasikan dalam perhimpunan Agung UMNO pada 10 November 1991. Mahathir mengubah kata “anak Melayu” dengan “rumpun Melayu” pada lirik lagu resmi UMNO yaitu “Bersatu, Bersetia, Berkhidmat” untuk menggambarkan komposisi warga negara non-muslim dan non-Melayu Sabah sebagai anggota UMNO juga.

Kajian ilmiah tentang kebijakan UMNO dalam perkembangan Islam di Malaysia penting dilakukan karena memiliki keunikan tersendiri dibandingkan partai politik lain. UMNO sebagai organisasi politik yang kemudian menjadi partai politik terkuat dan berpengaruh di Malaysia dalam mencapai kemerdekaannya, bahkan hingga saat ini. Selain itu, kebijakan politik UMNO menarik untuk dikaji, karena perkembangan Islam di Malaysia, tentunya dicapai dengan perjuangan dan kebijakan

politik menjadi langkah yang cukup penting dalam proses perkembangan Islam di Malaysia. Penelitian ini menjadi lebih menarik karena anggota UMNO menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, seperti Mahathir Mohamad yang menjadi perdana menteri tahun 1981 sampai 2003. Melalui jabatannya tersebut Mahathir menerapkan aturan Islam dalam kehidupan muslim Malaysia. Pada masa ini pemerintah secara jelas memperhatikan dukungan dan sikap pro Islam baik infrastruktur, struktural, maupun kultural. Hal demikian bertujuan untuk menegaskan keberpihakan UMNO terhadap Islam dan rakyat Malaysia.

Batasan temporal penelitian ini tahun 1981-2003 M. Rentang waktu tersebut digunakan karena pada tahun 1981 pemerintah mulai memperhatikan keberadaan umat Islam, yang ditandai dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan beragama umat Islam. Adapun batasan tahun 2003 dijadikan batasan penelitian karena pada tahun tersebut jumlah umat Islam telah mencapai angka 60% dari total penduduk Malaysia. Hal tersebut menggambarkan semakin banyak penduduk Malaysia dengan tanpa khawatir memeluk Islam. Selain itu pada tahun tersebut jumlah tempat ibadah semakin banyak, sehingga umat Islam dapat dengan mudah menunaikan ibadah dengan terang-terangan.

Penelitian ini fokus mengkaji kebijakan politik UMNO dalam perkembangan Islam di Malaysia. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, kajian ini mengacu pada tiga rumusan masalah penelitian. *Pertama*, bagaimana perkembangan UMNO sebagai partai politik di Malaysia. *Kedua*, bagaimana dinamika perkembangan kebijakan politik UMNO terhadap perkembangan Islam di Malaysia. *Ketiga*, mengapa kebijakan politik UMNO dapat membawa perkembangan Islam di Malaysia.

TEORI DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan politik pemerintahan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dinamika perkembangan kebijakan politik UMNO dan pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Malaysia. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Carl

Friedrich. Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang mencakup 4 tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dan mengatasi dalam rangka merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. UMNO dengan tegas menolak kebijakan Uni Malaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Inggris, karena dinilai merugikan masyarakat Melayu dan sultan sebagai pemimpin pemerintahan tidak diberi hak dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, UMNO mengajak seluruh lapisan masyarakat Melayu untuk menentang kebijakan tersebut, hingga pemerintah Inggris mencabut Uni Malaya atas Malaysia.

Sebagai partai politik terkuat di Malaysia, UMNO mengambil langkah bijak dalam memperlakukan etnis non Melayu yang notabene non Muslim. UMNO mengajak masyarakat non Muslim untuk bergabung dalam partai politik, sehingga dengan demikian permasalahan kesenjangan antar etnis mendapat solusi yang bisa diterima semua pihak. Meski demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan gejolak dari partai oposisi PAS yang menuntut pemerintah untuk menjadikan syariat Islam sebagai landasan negara. UMNO menolak tuntutan tersebut melalui seruan Mahathir Muhammad, bahwa penerapan ajaran Islam tidak harus dengan menjadikan Islam sebagai hukum negara, namun dari dalam diri setiap individu yang taat terhadap syariat Islam.

UMNO banyak mengambil Kebijakan Politik melalui pemimpinnya yang menjabat sebagai perdana menteri, salah satunya Mahathir Muhammad. upaya untuk memberikan peluang terhadap perkembangan Islam di Malaysia. Pemerintah kemudian mendirikan Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) atau yang lebih dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yakni Pusat Penelitian Islam, Institut Dakwah, dan Institut al Quran. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan Yayasan Dakwah Islamiyah juga turut didirikan untuk memperkuat eksistensi Islam di Malaysia. Kebijakan UMNO dalam bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan hukum juga terlihat jelas tujuannya, yakni untuk mendorong berkembangnya Islam

di Malaysia.

Kajian terhadap UMNO yang sudah ada sebelumnya merupakan wawasan pengetahuan dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Karya ilmiah tentang partai politik UMNO sudah banyak ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tentang UMNO tidak dapat dilepaskan dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik karena kemiripan konteks dan cakupannya. Adapun penelitian tersebut yaitu:

Pertama penelitian Shahrudin Badaruddin, yang berjudul *Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia*, diterbitkan oleh Universiti Malaya pada tahun 2011. Pada penelitian ini menguraikan potret politik yang terjadi di Malaysia, khususnya dominannya pengaruh Islam dan etnis Melayu terhadap politik di Malaysia. Penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan dengan kajian ini terkait partai politik di Malaysia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada satu partai politik, yaitu UMNO yang berkontribusi besar terhadap perkembangan Islam di Malaysia, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang beberapa partai politik lain yang terlibat dalam politik di Malaysia.

Kedua Hamdan Daulay, jurnal berjudul “Dinamika Dakwah dan Politik Islam di Malaysia (Kajian Manajemen Dakwah dan Politik Partai Islam PAS)” diterbitkan oleh Jurnal Tadbir tahun 2020. Berisi tentang Dinamika dakwah dan politik Islam di Malaysia yang mengalami pasang surut seiring dengan gerakan politik yang ada. Persamaan dengan penelitian ini adalah kajiannya terhadap politik dan penyebaran Islam di Malaysia. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya fokus pada partai PAS sedangkan penelitian ini fokus pada partai UMNO.

PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Malaysia

Malaysia menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dan jemaah menteri, sedangkan wewenang sultan atau raja terbatas. Perdana menteri dipilih berdasarkan keputusan pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Adapun administrasi negara dipimpin oleh Yang dipertuan Agung, terdiri dari Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Sistem administrasi Malaysia

terbagi atas pemerintah pusat, pemerintah negeri, dan pemerintah daerah. Struktur pemerintah Pusat terdiri atas: Yang di-Pertuan Agung, Perdana Menteri, Jemaah Menteri, dan kementerian.

Malaysia merupakan federasi 13 negeri dan dua wilayah federal Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ke-13 negeri tersebut adalah Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Trengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Malaka, Sabah dan Sarawak. Sebagai negara multi etnis dan multi agama, sistem pemerintahan di Malaysia juga tidak luput dari komunalisme. Mayoritas partai politik yang berdiri di Malaysia dilatarbelakangi oleh kepentingan etnis. Masing-masing etnis memiliki kepentingan dan konflik. Pergerakan politik di Malaysia seringkali didasarkan pada tujuan utama kepentingan etnis. Seorang politisi akan sulit memperoleh dukungan jika tidak mengutamakan kepentingan etnis.

Pengejawantahan dari komunalisme di Malaysia dapat dilihat dari berdirinya Partai politik yang menjadi representasi masing-masing etnis yang dominan. Salah satunya partai politik UMNO sebagai representasi bagi orang-orang Melayu. Orang Cina juga mendirikan partai politik tersendiri yang bernama *Malayan Chinese Association* (MIC) di tahun 1949. Etnis India membentuk partai politik sendiri pada tahun 1946, yakni *Malaysian Indian Congress* (MIC). Walaupun demikian, partai UMNO sebagai manifes dari etnis Melayu menjadi partai politik yang paling kuat dan dominan sejak awal kemunculannya hingga saat ini.

Berdirinya UMNO

UMNO (*United Malays National Organizations*) adalah partai politik tertua dan paling terkemuka di Malaysia. Partai ini berperan dominan dalam pemerintahan negara Malaysia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 11 Mei 1946. Salah satu alasan pembentukan organisasi ini adalah untuk menyatukan tekad seluruh lapisan masyarakat Melayu dalam menentang kolonialisasi dan move politik Inggris yang ingin menjadikan Malaysia negara Uni Malaya.

Inggris yang dulu telah menyerahkan Semenanjung Malaya kepada Jepang, kembali ingin menjajah Tanah Melayu dengan membentuk Uni Malaya, yaitu pemerintahan yang menyatukan seluruh Malaya di bawah pemerintahan Inggris dengan menitikberatkan pada

kesetaraan status kewarganegaraan bagi seluruh kelompok etnis baik Melayu, Cina maupun India. Pada tanggal 1-4 Maret 1946 di Kuala Lumpur, diadakan kongres Melayu se-Malaya, membahas keinginan Inggris untuk meneruskan penjajahannya dengan menjadikan 'Wilayah Yang Dinaungi' menjadi 'Wilayah Tanah Jajahan'. Tiga solusi ditawarkan dalam kongres ini sebagai langkah mencari solusi terhadap move politik Inggris, yakni: membentuk organisasi kebangsaan Melayu, menentang keras pembentukan pemerintahan Uni Malaya, dan meningkatkan pendidikan bangsa Melayu. Selanjutnya juga dipersiapkan draf piagam atau konstitusi UMNO yang akan disidangkan dalam kongres selanjutnya.

Pada tanggal 1 April 1946 pemerintah Inggris tetap merealisasikan Uni Malaya, sehingga diadakan kongres kedua di Johor Baru pada tanggal 11 Mei 1946. Hasil dari kongres tersebut menyepakati pembentukan organisasi politik bangsa Melayu dengan nama Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu dengan singkatannya PERKEMBAR, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *United Malays National Organizations* (UMNO). PERKEMBAR inilah yang kemudian populer dengan nama UMNO. Organisasi yang hadir dalam kongres pembentukan UMNO mewakili tiap-tiap negeri di Tanah Melayu hingga ke Singapura. Seluruh organisasi tersebut sepakat mendukung UMNO dan akan berjuang dengan tujuan dan cita-cita yang sama.

UMNO menjadi wadah bagi bangsa melayu untuk menentang kebijakan Uni Malaya. Pemimpin elite UMNO berhasil membujuk para sultan agar tidak menghadiri upacara pelantikan gubernur pertama Uni Malaya, Edward Gent, dan melarang orang-orang Melayu yang menjadi anggota Majlis Musyawarah Negeri menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan Uni Malaya. Seluruh orang Melayu diminta berkabung selama seminggu mulai dari 1 April 1946, saat pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan berdirinya Uni Malaya -bagi orang Melayu hal tersebut menjadi tanda hilangnya kemerdekaan Tanah Melayu-. Selain itu, UMNO juga meminta kaum Melayu unjuk rasa secara damai saat wakil-wakil parlemen pemerintah British tiba di Melayu untuk meninjau dan mendengarkan pendapat orang Melayu.

Keputusan yang diambil oleh UMNO membuahkan hasil. Kapten Gammons berkesimpulan bahwa Uni Malaya tidak disetujui oleh

semua lapisan masyarakat Melayu. Menurutny: “Orang Melayu tidak memiliki kepercayaan kepada British”. Kebangkitan dan semangat nasionalisme orang Melayu merupakan simbol serta manifes kemarahan dan penentangan terbuka bangsa Melayu terhadap kebijakan Uni Malaya.

Dua bulan setelah terbentuknya Uni Malaya, kerajaan British merubah kebijakannya dan bersedia mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil UMNO untuk membahas rencana pembentukan kerajaan persekutuan baru. Pertemuan tersebut berlangsung hingga 21 Januari 1948 dan melahirkan kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni raja Melayu dan wakil pemerintah British. Berdasarkan perjanjian tersebut, pada tanggal 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu secara resmi dibentuk. Hal ini menandai pemulihan kembali kedudukan raja-raja Melayu. Pemerintah Inggris bersedia mengembalikan semua kekuasaan dan kedaulatan sultan-sultan.

Pada tahun 1946-1948 UMNO bergerak sebagai organisasi dan afiliasi dari sejumlah organisasi bangsa Melayu. Organisasi-organisasi tersebut mempunyai falsafah, dasar dan cita-cita perjuangan yang berbeda-beda. Setiap organisasi memiliki kekuasaan otonomi, sehingga tidak ada kekuasaan mutlak terhadap organisasi-organisasi tersebut. Pada masa awal pembentukannya sebagai sebuah organisasi, UMNO sudah memiliki asas, tujuan dan aturan-aturan tertentu. Konstitusi UMNO 1946 telah menjadi wadah dan simbol pemersatu organisasi-organisasi yang berafiliasi tersebut, karena konstitusi ini menetapkan berbagai ketentuan dan acuan dalam menjalankan roda kepemimpinan UMNO.

Akhirnya, pada tahun 1948, para elite UMNO berpendapat bahwa sebuah organisasi tidak bisa bergerak secara optimal karena anggotanya yang berasal dari berbagai organisasi yang berbeda-beda, mempunyai dasar, prinsip dan cita-cita perjuangan serta langkah-langkah yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam suatu persidangan di Kota Bahru pada 11-12 Mei 1947, anggota Jawatan Kuasa Tertinggi UMNO mengusulkan agar UMNO diubah menjadi satu unit partai politik. Setelah UMNO merumuskan kembali konstitusi organisasinya pada 1 Februari 1948, usulan tersebut terealisasi. Perubahan status dari organisasi politik menjadi partai politik bertujuan agar bangsa Melayu lebih percaya diri dan lebih

optimis untuk menghadapi politik Tanah Melayu pasca 1948 melalui UMNO. Organisasi-organisasi yang dulu berafiliasi dijadikan cabang-cabang UMNO yang tunduk pada konstitusi UMNO. Sehingga perbedaan identitas masing-masing organisasi akan tergantikan dengan persatuan.

Dinamika Politik UMNO dan Perkembangan Islam Di Malaysia 1981-2003 M

Pada tahun 1970-an pemerintah secara jelas memperlihatkan kebijakan akomodatif dan pro-Islam secara infrastruktur, struktur dan kultur. Pada masa pemerintahan Mahathir, kebijakan tersebut terlihat lebih menonjol. Sikap akomodatif tersebut ditunjukkan dengan berbagai kebijakan yang meyakinkan rakyat Malaysia dan kaum Muslimin, bahwa pemerintah dan UMNO mendukung peran Islam. Pemerintah bahkan melaksanakan program “islamisasi” dan “penerapan nilai-nilai Islam” yang menghabiskan anggaran relatif besar. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada saat itu memiliki andil besar.

Secara struktural, sikap akomodatif pemerintah dapat dilihat pada kebijakannya merekrut sejumlah aktivis Muslim untuk terlibat dalam sistem pemerintahan. Sikap akomodatif itu juga dapat dilihat pada peristiwa penting ketika Mahathir mengajak Anwar Ibrahim, seorang aktivis dan tokoh Islam yang kharismatik, untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Keterlibatan Anwar dalam pemerintahan dinilai sebagai sebuah komitmen pemerintah terhadap Islam, Anwar juga telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan Islam dan umat Islam di negara tersebut. Sebagian kalangan berpendapat bahwa berdirinya International Islamic University Malaysia (IIUM) dan Bank Islam, sebagian atas upaya Anwar, sehingga ia menjadi membuka jalan terciptanya berbagai kebijakan Islam.

Kontribusi Anwar dalam kebijakan-kebijakan Islamisasi pemerintah cukup jelas karena Anwar pernah menduduki posisi di kabinet yang berhubungan dengan Islam dalam waktu yang cukup lama. Mahathir sering meminta Anwar untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan keislaman pemerintah seperti kebijakan pembangunan tempat permanen untuk Kamp Pemuda Islam Internasional pada bulan September 1982, relokasi klub-klub Turf agar jauh dari kota, keputusan tidak menyetujui pembukaan rumah judi baru, pendirian Pegadaian

Islam, Asuransi Islam, dan melarang warga Muslim menjadi pelanggan Kasino di Genting Highland. Keberadaan Anwar dalam pemerintahan, menggugah pemimpin ABIM lainnya mendukung peran Islam dalam pemerintahan negara dan masyarakat. Bahkan beberapa orang pemimpin ABIM melibatkan diri pada institusi-institusi Islam seperti IIUM, Bank Islam, dan sebagainya.

Akomodasi struktural lainnya bisa dilihat dari kebijakan pada awal tahun 1980-an yakni rekrutmen 850 orang guru agama ke dalam lembaga pemerintahan. 100 orang ditugaskan pada Unit Islam kantor Perdana Menteri dan 750 orang lainnya ditugaskan di kantor Menteri Pendidikan. Berikut beberapa kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan Islam di Malaysia.

Penerapan Ajaran Islam

Pada dasarnya, urusan agama Islam menjadi wewenang pemerintah negara bagian, sesuai ketetapan Konstitusi Malaysia, sultan menjadi pimpinan agama Islam di negerinya masing-masing dan negeri yang tidak mempunyai sultan seperti Pulau Pinang, Malaka, Sabah dan Sarawak serta Wilayah Federal Kuala Lumpur sendiri, Yang di-Pertuan Agung menjadi pimpinan agama. Pada prakteknya pemerintah merasa perlu mengatur agar aktivitas Islam tersebut tidak menjadi sumber instabilitas. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan peran pemerintah dalam mendukung Islam juga untuk menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan warga non-Muslim terhadap pernyataan Mahathir atas “Islam fundamentalis” salah satunya menginginkan penerapan hukum Islam atau terbentuknya negara Islam di Malaysia. Oleh karena itu, untuk menetralsir gerakan-gerakan fundamentalis serta untuk mengatur dan mengkoordinir aktivitas Islam, pemerintah mendirikan sejumlah institusi Islam milik pemerintah, atau mengembangkan lembaga-lembaga yang sudah ada.

Institusi-institusi yang didirikan pemerintah bertempat di Pusat Islam berdampingan dengan Masjid Negara. Pusat Islam berperan sebagai simbol aspirasi pemerintah dalam menyebarkan Islam juga berfungsi sebagai pusat birokrasi administrasi keislaman milik pemerintah serta mengkoordinasi seluruh kegiatan keislaman. Pemerintah kemudian mendirikan Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) atau yang lebih dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yakni Pusat Penelitian Islam, Institut Dakwah, dan Institut al

Quran. Beberapa program yang dilaksanakan BAHEIS yaitu program takmir masjid, pendidikan Islam, penyeragaman undang-undang, peningkatan kerjasama dalam bidang keislaman antara negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia, peningkatan usaha dakwah islamiyah di kalangan umat, peningkatan pengawasan akidah umat Islam, pemantapan sekolah-sekolah agama di seluruh negeri, dan program rumahku surgaku.

Penyeragaman administrasi keislaman serta pengelolaan kegiatan masjid di seluruh negeri melalui BAHEIS merupakan manifes atas kekhawatiran pemerintah terhadap aktivitas Islam yang mencolok. Sebagai negara yang multi agama, Malaysia harus menjaga stabilitas dengan tidak mengesampingkan penduduk non Muslim. BAHEIS merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengawasi kegiatan badan dan organisasi keagamaan, seperti mencegah penyebaran ajaran sesat. Pemerintah telah menetapkan, ajaran dan amalan Islam berdasarkan pada paham Ahlu al-Sunnah wa al-jamaah. Ajaran sesat dan yang menyimpang dari paham ini dipandang dapat memecah-belah kesatuan umat Islam.

Pada tanggal 1 Juli 1992 BAHEIS menyelenggarakan program “Rumahku Syurgaku” yang diinisiasi Perdana Menteri Mahathir Muhammad dan bertujuan untuk mewujudkan institusi keluarga yang bahagia serta sistem kekeluargaan yang kokoh untuk selanjutnya membentuk masyarakat penyayang dan budaya saling menyayangi. BAHEIS berkontribusi besar sebagai agen pemerintah dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan kebijakan “penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan” tahun 1982. Dasar pemikiran kebijakan itu adalah bahwa pembangunan dan kejayaan sebuah negara tergantung pada nilai-nilai hidup dan etika kerja yang positif di kalangan pekerja-pekerjanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam seperti “bersih, cekap dan amanah” harus ditanamkan dalam jiwa semua pegawai pemerintah dan rakyat. BAHEIS memiliki pengaruh kuat dalam proses munculnya berbagai institusi Islam dan penyediaan berbagai pelatihan yang diadakan pemerintah, termasuk di dalamnya pendirian Institut Dakwah yang menyelenggarakan berbagai kursus Islam bagi para pegawai negeri, pemuda dan para korps diplomatik Malaysia; Yayasan Dakwah Islam; Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam; Institut Keguruan dan Training Islam; serta Lembaga Pengelola

Dana Haji (LUTH). Sejak tahun 1997 pemerintah memperluas wewenang dan kedudukan BAHEIS dari sebuah Bagian menjadi sebuah Jabatan, dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Selain BAHEIS pemerintah juga mendirikan institusi lain yakni Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan Yayasan Dakwah Islamiyah. Tujuan didirikannya Yayasan Dakwah Islamiyah untuk mengadakan kaderisasi da'li dan mengkoordinir aktivitas dakwah, meningkatkan mutu dakwah islamiyah, menyatukan tenaga dan pikiran serta menyusun barisan yang kuat dan teratur untuk melaksanakan tugas jihad, serta menegakkan kemaslahatan dan memberantas kemungkaran.

Bidang Infrastruktur

Selain kebijakan dalam penerapan agama Islam, pemerintah juga menyediakan infrastruktur untuk membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Realisasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari pembangunan masjid-masjid untuk memenuhi kebutuhan tempat ibadah umat Muslim. Manifestasi kebijakan pro-Islam lainnya dalam upaya pemerintah menyediakan infrastruktur di berbagai bidang kehidupan: ekonomi, dakwah dan syiar Islam, pendidikan dan aspek-aspek lainnya dalam meningkatkan keberagaman masyarakat Muslim.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung infrastruktur pendidikan adalah pembangunan Sekolah Guru Islam (Islamic Teachers' College), yang menghabiskan dana senilai M\$ 22 juta. Tahun 1982, pemerintah mengadakan tempat permanen untuk Kamp Training Islam Internasional, Pemerintah juga menyalurkan dana M\$ 22 juta untuk kegiatan pelatihan guru-guru agama dan membentuk Yayasan Dakwah Islamiyah, dan pembangunan Universitas Islam Internasional (IIUM) senilai M\$ 500 juta. Pada tiga tahun pertama operasional IIUM, juga dibiayai oleh pemerintah melalui dana General and Revenue Funds dengan bantuan Arab Saudi. Pemerintah juga membangun Bank Islam, Asuransi Islam dan Pegadaian Islam. Adapun untuk koordinasi administrasi Islam pemerintah membangun Pusat Islam yang megah dengan fasilitas lengkap. Pada tahun 1983, pemerintah juga mensubsidi pembangunan Rumah Sakit Pusat Islam.

Bidang Pendidikan

Sebenarnya, pemerintah lebih dulu membuat kebijakan pro-Islam dalam bidang pendidikan. Jabatan Menteri Pendidikan pada saat itu dipegang oleh Mahathir Muhammad, tokoh yang banyak berkontribusi dalam upaya islamisasi di Malaysia. Sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 1974, Mahathir meninjau kembali sistem pengajaran agama Islam yang dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman. Segera Mahathir kemudian membentuk Dewan Penasehat untuk pendidikan agama Islam agar Islam relevan dengan kebutuhan modernisasi masyarakat Muslim Malaysia dan agar gerakan ini dilaksanakan secara sistematis dan koordinatif.

Pada tahun 1975, Kementerian Pendidikan memperbaiki pelaksanaan pelatihan guru-guru agama Islam hingga menghabiskan dana senilai M\$ 22 juta. Satu tahun setelahnya, pemerintah pengambilalihan 10 sekolah Islam terbaik untuk memperbaiki manajemen serta meningkatkan kinerja para guru maupun pegawainya untuk dijadikan sebagai sekolah model. Pada tahun 1979, pengetahuan agama Islam ditetapkan sebagai materi ujian di tingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan didirikan Pusat Penelitian Islam Asia Tenggara dengan anggaran dana senilai M\$ 26 juta. Pemerintah juga mendirikan Maktab Perguruan Islam (Islamic Teachers' College), senilai M\$ 22 juta di tahun 1980, yang dari sana murid-murid yang berpotensi akan dikirim ke Mesir, Pakistan dan Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah juga mendirikan universitas Islam berskala internasional (IIUM) yang didanai oleh pemerintah serta bantuan Arab Saudi.

Bidang Ekonomi

Pemerintah juga mendeklarasikan kebijakan Pro Islam dengan pembaruan sistem ekonomi negara, yakni disesuaikan dengan ajaran agama Islam mengusung prinsip “tidak ada bunga” di dalam setiap transaksi keuangan. Rasa tidak puas terhadap pelaksanaan konsep ekonomi modern menjadi latar belakang kebijakan tersebut. Konsep ekonomi modern dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi karena melebarnya kesenjangan sosial antara yang mempunyai dan tidak punya (the have and the have not). Pemerintah

berusaha meyakinkan masyarakat non Muslim bahwa sistem ekonomi Islam tetap akan menguntungkan semua pihak, baik rakyat Muslim maupun non Muslim.

Tindak lanjut atas kebijakan sistem ekonomi Islam adalah penyediaan sumberdaya manusia dan infrastruktur. Pada tahun 1981-1982, dibentuklah Kelompok Sumberdaya Islam dan Kelompok Khusus Penegakan Islam serta mendirikan Bank Islam, Pegadaian Islam, Asuransi Islam dan Yayasan Ekonomi Islam. Kebijakan pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Mahathir, benar-benar menunjukkan usaha pemerintah yang dipimpin UMNO dalam merealisasikan cita-cita Islam melalui program dan kebijakan pro-Islam. Hal tersebut merupakan fenomena dan arah baru perjuangan UMNO di bawah kepemimpinan Mahathir, dengan mantan presiden ABIM, Anwar Ibrahim yang terjun ke dalam politik UMNO, pemerintah dan UMNO telah mengangkat status Islam sebagai suatu major force dalam berbagai aspek kehidupan.

Bidang Hukum

Para tokoh Islam di Malaysia terobsesi untuk menerapkan sistem hukum Islam. Adanya stigma bahwa sistem hukum yang berlaku merupakan sistem hukum warisan Inggris dan asing bagi umat Muslim maupun non Muslim menjadi latar belakang substantif obsesi tersebut. Asumsi bahwa hukum yang sedang diberlakukan itu bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak mewujudkan keadilan yang dikehendaki oleh fitrah manusia menjadi faktor pendukungnya. Muslim Malaysia juga terdorong melaksanakan hukum Islam karena institusi modern yang diperkenalkan Barat terhadap Dunia Islam belum berhasil memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat karena sanksi terhadap pelaku kejahatan terlalu ringan, sehingga tidak dapat membuat jera. Semakin ramainya tempat-tempat ibadah, seperti mesjid, mushalla, dan langgar dari kota-kota sampai daerah-daerah terpencil di pedesaan mendorong meningkatnya kesadaran agama umat Islam.

Ulama berada pada barisan terdepan dalam upaya merealisasikan sistem hukum Islam. Pemerintah melalui UMNO yang memimpin saat itu, memulai penerapan aturan agama demi mendukung pelaksanaan ajaran al-Quran dalam kehidupan kaum Muslim, seperti; penetapan hukuman bagi yang tidak melaksanakan

shalat jum'at di mesjid, orang yang meminum minuman keras, berjudi, tidak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan di depan umum, penetapan hukuman karena mengajarkan doktrin yang salah, berzina, atau menghina pejabat agama atau Islam.

Pada 1978, pemerintah menyatakan akan merevisi sistem hukum nasional agar diselaraskan dengan sistem hukum Islam pada realisasinya tidak mengalami perkembangan signifikan. Salah satunya penyetaraan status hakim dan pengadilan Islam. Kedudukan pengadilan agama di Malaysia, baik di wilayah hukum Malaya maupun Borneo (Sabah dan Sarawak) tetap lebih rendah dibanding dengan kedudukan pengadilan umum. Pengadilan agama hanya menangani perkara-perkara perdata dan pidana umat Islam yang kadar kejahatannya paling rendah terlihat dari segi nilai denda yang paling rendah. Peradilan agama hanya dapat memutuskan hukum maksimal hukuman tiga tahun penjara atau denda RM 5.000.00 atau sebat enam rotan atau gabungan kedua hukuman.

Berdasarkan realisasi tersebut, hukum Inggris tetap diterapkan dan diberlakukan, bahkan "Hukum Islam setelah kemerdekaan tunduk pada sistem nilai non-Islam." UU Hukum Perdata 1956, menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, pengadilan perdata harus mengakui hukum Adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hukum Islam hanya dapat diterapkan pada wilayah-wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama, itu pun hanya untuk orang Islam.

KESIMPULAN

Malaysia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Pemerintahan Inggris. Namun pada tanggal 31 Agustus 1957 Malaysia berhasil mencapai kemerdekaannya, hasil dari perjuangan panjang dan keterlibatan berbagai pihak. Partai politik menjadi garda depan dalam proses kemerdekaan Malaysia. UMNO merupakan partai politik yang paling berpengaruh di Malaysia. Melalui Kebijakannya, UMNO berhasil menyatukan masyarakat Melayu untuk menentang pemerintah Inggris hingga kebijakan Uni Malaya dihapus. UMNO juga menunjukkan keberpihakannya terhadap Islam dengan mendirikan berbagai lembaga Islam mulai dari lembaga penelitian, dakwah, dan fasilitas umum

seperti bank, asuransi, serta pegadaian Islam. ‘

Walaupun demikian, UMNO juga berhasil menstabilkan hubungan antar etnis masyarakat Malaysia. Etnis non Melayu yang notabene non Muslim, diikutsertakan dalam partai politik untuk menyetarakan kedudukan masyarakat dalam pemerintahan. Adapun tuntutan partai oposisi untuk menjadikan Islam sebagai hukum negara, ditolak oleh UMNO melalui kebijakan Mahathir Muhammad yang menyatakan penerapan syariat Islam dalam diri masing-masing setiap individu.

REFERENSI

- Abdullah, Abdul Rahman Haji. (1997). *Penjajahan Malaysia Cabaran dan Warisannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Hashim, dkk. (1998). *Perspektif Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Media Universitas Malaya & Hizbi.
- Adam, Ramlah. (2007). *UMNO: Organisasi dan kegiatan 1945-1951*. Kelantan: Nawi Book Store.
- Ahmad, Zakaria Haji. (1987). *Government and Politics of Malaysia*. New York: Oxford University Press.
- Anwar, Zainah. *Kebangkitan Islam di Malaysia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Badaruddin, Shaharuddin. (2011). *Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Esposito, John L. & John O.Voll. (1996). *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Hamid, Abu Bakar, dkk. (1996). *UMNO Johor Memartabatkan Bangsa Melayu*. Kuala Lumpur: Berita Publishing SDN.
- Helmiati. (2007). *Islam dalam Masyarakat dan Politik Malaysia*. Pekan Baru: Suska Press.
- Kadir, Laila, dkk.,. (1994). *Malaysia buku resmi tahunan 2001*. Kuala Lumpur: Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia, Kementerian Penerangan.
- Khalid, Khadijah Md. (2007). *Politics in Malaysia: The Malaysia Dimension*. London: Routledge.
- Mahmood, Ibrahim. (1991). *Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
- Makaruddin, Hasyim. (2003). *Islam and the Muslim Ummah: Selected Speeches of Dr. Mahathir Muhammad*. Malaysia: Pelanduk

Publications.

- Milne, R.S. & Mauzy, Diane K. (1992). *Politik dan Kerajaan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mutalib, Hussin. (1990). *Islam and Ethnicity in Malay Politics*. Singapore: Oxford University Press.
- Nagata, Judith. (1984). *The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and Their Roots*. Vancouver: University of British Columbia Press.
- Nasir, Zulkifli Mohd dan A.Karim Abdullah. (1992). *UMNO Teras Politik, Melayu Teras Negara: Dokumentasi Pemikiran Pemimpin-pemimpin UMNO*. Kuala Lumpur: Bukuraya Media.
- Nasir, Zulkifli Mohd dan A.Karim Abdullah. (1984) *Pentadbiran (Pemerintahan) Berasaskan Nilai Islam Membawa Kebahagiaan*, Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia.
- Mohammad, Mahathir. (2002) *Interaction-Integration*. Kuala Lumpur, Intisari. Saifullah. (2021) *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Othman, Ahmad Luthfi. (1992). *Selepas Mahathir Peluang PAS*. Kuala Lumpur: Penerbitan Pemuda.
- Zakaria, Abdul Aziz. (1987). *Jentera Pentadbiran Kerajaan di Malaysia Suatu Pengenalan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Daulay, Hamdan. (2020). *Dinamika Dakwah dan Politik Islam di Malaysia (Kajian Manajemen Dakwah dan Politik Partai Islam PAS)*. Tadbir: *Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, Volume 2, Nomor 1.
- Maiwin, Mohammad. (2017). *Etnisitas, Politik dan Pembangunan Negara Bangsa di Malaysia*. *Journal of Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Volume 16, Nomor 2.
- Nizar. (2019) *Kegagalan Politik UMNO dalam Pemilihan Raya Umum ke-14*. *Journal of Wacana Publik*, Volume 13, No. 02, Desember.
- Ramli, Makatukang. (2003). *Penerapan Hukum Islam di Malaysia*. *Journal of Al-Syir'ah* Institut Agama Islam Negeri Manado, Vol. 1 No.1.
- Renre, Abdullah. (2012). *Perkembangan Islam di Malaysia (Suatu Tinjauan Sosio Historis)*. *Journal of Adabiyah*, Vol. XII, Nomor 2.

- Rohman, Abdul. (2020). Perkembangan Islam dan Gerakan Politiknya di Malaysia. *Journal of JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol. 2, Nomor 1.
- Tawfik Yaakub, Mohammad, dan Md Rasip, Osman. (2017). Impak Kerjasama Politik Umno-Pas Terhadap Perkembangan Islam Di Malaysia Dari Tahun 1973 Hingga 1978. *Journal of Sains Insani*, 12-16. doi: 10.33102/sainsinsani.vol2no1.14
- Ummatin, Khoiro. (2020). Demokratisasi dalam Politik Kepartaian Islam (Studi Komparatif PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia). *Journal of Poros Onim: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 1, 19-30. doi: 10.53491/porosonim.v1i1.23
- Azra, Azyumardi. (2021). *Krisis Melayu Malaysia (2); Hak istimewa kaum Melayu Muslim memiliki sejarah panjang* website: <https://www.republika.id/posts/18918/krisis-melayu-malaysia-2>
- Azra, Azyumardi. (2021). *Krisis Melayu Malaysia (2)* website: <https://www.uinjkt.ac.id/krisis-melayu-malaysia-2/>